



**PETUNJUK PELAKSANAAN
RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
“RELAWAN PILGUB DKI SI MONAS” (REPINAS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA
TAHUN 2017**

PENDAHULUAN

Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis Kabupaten/Kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Di sisi lain, harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dimana upaya antisipasi atas situasi kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang

menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (*voluntarisme*) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 mesti menjadi titik balik persoalan partisipasi pemilih yang sebelumnya ada. Angka partisipasi memilih harus meningkat dan inflasi kualitas memilih harus dipulihkan bahwasanya memilih adalah tindakan politik yang mulia. KPU Provinsi DKI Jakarta bersama komponen bangsa lainnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik itu terwujud.

Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU Provinsi DKI Jakarta melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 6 (enam) segmen pemilih strategis yaitu:

1. pemilih pemula;
2. kelompok agama;
3. kelompok perempuan;
4. penyandang disabilitas;
5. kelompok marginal dan/atau;
6. kelompok profesional.

Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain itu segmentasi tersebut adalah

strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

TUJUAN

Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

PERSYARATAN RELAWAN DEMOKRASI

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun.
3. Bisa membaca dan menulis.
4. Berdomisili di wilayah setempat dan memiliki KTP DKI Jakarta.
5. *Nonpartisan*, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

6. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu.
7. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
8. Bertanggungjawab dan berakhlak baik.
9. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu.
10. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
11. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan:

1. Fotocopi KTP Elektronik.
2. Fotocopi ijazah yang terakhir (jika ada).
3. Pas photo 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
4. Surat pemenuhan persyaratan yang meliputi:
 - a. Pernyataan kesediaan menjadi relawan demokrasi.
 - b. Pernyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir dan Tim Sukses Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.
 - c. Pernyataan tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.
 - d. Pernyataan bukan bagian dari Penyelenggara Pilgub 2017.
5. *Curriculum Vitae* (daftar riwayat hidup).

REKRUTMEN

1. Rekrutmen Relasi Repinas dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
2. Pelantikan Repinas dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.
3. Relawan demokrasi meliputi segmen pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal.

4. Jumlah relawan demokrasi maksimal 18 orang per-Kabupaten/Kota, dengan rincian setiap segmen terdiri dari komposisi yang berimbang sesuai dengan kebutuhan setempat.
5. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa pembebanan anggaran DIPA KPU Provinsi.
6. Pendaftaran relawan demokrasi dilakukan melalui:
 - a. pendaftaran langsung di KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap komunitas; atau
 - b. berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap komunitas.
7. Terhadap pendaftar dilakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi.

PENINGKATAN KOMPETENSI

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi mengikuti *Training of Trainer* untuk Relawan Demokrasi dengan materi:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis.
3. Kode etik relawan.
4. Teknik-teknik berkomunikasi publik.
5. Materi lain yang relevan.

MATERI SOSIALISASI

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang:

1. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi.
2. Tata cara pemberian suara dalam pemilu.

3. Pengenalan terhadap kontestan pemilu.
4. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen.

MEKANISME KERJA

1. Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. Simulasi;
 - b. Bermain peran/ *role playing*;
 - c. Diskusi kelompok/FGD;
 - d. Ceramah;
 - e. Alat bantu (*visual* dan *nonvisual*);
 - f. *Posting* materi sosialisasi ke media sosial.
2. Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:
 - a. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KODE ETIK

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan pemilu diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Bersikap independen, imparial, dan *nonpartisan* terhadap peserta pemilu.
2. Tidak melakukan tindak kekerasan.
3. Menghormati adat dan budaya setempat.
4. Tidak bertindak diskriminatif.

5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.

JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.
1.	Sosialisasi & Pendaftaran		Lewat <i>website</i>				
2.	Pengumuman Pendaftaran		5-22 Oktober dilaksanakan di KPU Kota dan KPU Prov				
3.	Penerimaan Pendaftaran		5-26 Oktober dilaksanakan di KPU Kab./Kota				
4.	Seleksi Wawancara		26-30 Oktober dilaksanakan di KPU Kab./Kota				
5.	Pengumuman Relawan Demokrasi yang Lolos		31 Oktober dilaksanakan di KPU Kab./Kota				
3.	Pelantikan dan Pembekalan Relawan Demokrasi			1 Nov Pelantikan dilaksanakan di KPU Prov	√		
4.	Relawan Turun ke lapangan			1 Nov 2016 – 1 Feb 2017	1 Nov 2016 – 1 Feb 2017	1 Nov 2016 – 1 Feb 2017	1 Nov 2016 – 1 Feb 2017

PELAKSANAAN

PELAKSANA	TUGAS
KPU PROVINSI	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan norma dan standar kegiatan Program Relawan Demokrasi.2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di Kab./Kota dalam lingkup provinsi.3. Melakukan supervisi pelaksanaan Program Relawan Demokrasi di kab./kota wilayah provinsi terkait.4. Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan Program relawan demokrasi di tingkat provinsi ybs kepada KPU RI.
KPU KAB./KOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan rekrutmen.2. Memberikan pembekalan.3. Mengkoordinir relawan demokrasi di setiap segmen4. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi.5. Membuat laporan bulanan pelaksanaan relawan demokrasi di wilayahnya.6. Melaporkan kepada KPU Provinsi.

PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan Program Relawan Demokrasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
2. Alokasi anggaran dimaksud adalah untuk membiayai 18 orang relawan. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, KPU Kabupaten/Kota dapat memfasilitasinya dengan tanpa pembebanan anggaran DIPA KPU Provinsi.

PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2016. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2016. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun

dan menyempurnakan pelaksanaan Program Relawan Demokrasi dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

Jakarta, Oktober 2016

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta